

B A B V

P E N U T U P

A. Kesimpulan.

Pada pokoknya anggaran haruslah mencerminkan politik pengeluaran pemerintah yang rasionil baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, sehingga akan terlihat bahwa :

1. Ada pertanggungjawab atas pemungutan pajak dan lain-lain pungutan oleh pemerintah, misalnya untuk memperlancar proses pembangunan ekonomi.
2. Adanya hubungan yang erat antara fasilitas penggunaan dana dan penarikannya.
3. Adanya pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan di dalam menentukan pola penerimaan pemerintah yang pada akhirnya menentukan pula tingkat distribusi penghasilan dalam perekonomian.

Dalam menghadapi kenyataan bahwa anggaran masih merupakan faktor pembatas yang di dalam pembinaan maupun pembangunan kekuatan ABRI, namun hal ini janganlah dipakai sebagai alasan tidak terlaksananya, atau ketidak berhasilnya suatu kegiatan, program atau sasaran yang ingin dicapai.

Kemampuan untuk menentukan prioritas, tindakan penghematan, ketertiban administrasi dan peningkatan pengawasan disegala bidang kegiatan, sangat diharapkan dari semua strata kepemimpinan. Sejalan dengan hal ini, maka pembangunan bidang politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain, makin ditingkatkan secara serasi, sepadan dan agar saling menunjang dengan pembangunan dibidang ekonomi, sehingga lebih menjamin ketahanan nasional. Sesuai dengan Garis Garis Besar Haluan Negara khususnya Pola Umum Pembangunan Lima Tahun, pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan dengan menekankan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka mempertahankan kebijaksanaan anggaran berimbang dan dinamis yang sudah menunjukkan hasil yang baik selama ini, masih perlu diadakan beberapa langkah penyesuaian yang bersifat realitis.

B. Saran - Saran.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka upaya yang disarankan untuk meningkatkan Daya Serap Anggaran yaitu dengan meningkatkan aktivitas dan

kualitas mutu dari variabel dominan yang mempengaruhinya, dengan menciptakan suatu kondisi kerja yang akan dapat mendukung perkembangan variabel yang mempengaruhi daya serap anggaran dan berkaitan langsung dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan anggaran itu sendiri. Sedangkan untuk setiap kotama hendaknya menyusun akan kebutuhannya yang didasari oleh prioritas dan perkiraan kemampuan sumber daya anggaran sampai dengan tolak ukur dan menyerahkan ke Asrena Kasal. Daftar usulan atas kebutuhan proyek pembangunan tersebut hendaknya dikoordinasikan dan diteliti secara lebih cermat dan terarah sehingga tidak ada pembebanan pada triwulan ke IV yang sifatnya kelihatan terlalu memaksa.

Upaya untuk meningkatkan daya serap anggaran di lingkungan TNI Angkatan Laut yakni dengan meningkatkan aktivitas dan kualitas dari variabel variabel yang dominan dengan menciptakan suatu kondisi kerja yang mendukung melalui serangkaian kegiatan atau tugas kelompok pengawasan kegiatan/proyek yaitu dengan :

- a. Memonitor terhadap waktu atau masa membuat perencanaan kegiatan/proyek.
- b. Memonitor waktu pengiriman atas dokumen perencanaan ke satuan atas.

- c. Mengawasi pelaksanaan atas kegiatan/proyek. Sejak dari penerbitan surat undangan lelang atau surat penawaran harga kepada pihak ketiga, pelaksanaan pelelangan, penanda tanganan kontrak dan memonitor mulai dari kegiatan tersebut sampai dengan selesainya kegiatan/proyek.
- d. Mengawasi waktu penyelesaian administrasi kegiatan/proyek.
- e. Mengawasi waktu pembayaran dan mengidentifikasi terhadap masalah jika terjadi keterlambatan pada setiap saat.
- f. Serta mengajukan saran-saran terhadap setiap pemecahan masalah guna kelancaran tugas serta serangkaian kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung dari setiap pelaksanaan tugas yakni dengan :
 - 1) Pembentukan dalam kelompok-kelompok bantuan.
 - a) Kelompok bantuan Pelaksanaan Program dan Anggaran ditingkat Pusat.
 - b) Kelompok Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan/proyek di tingkat Satker.
 - 2) Penentuan jadwal waktu pelaksanaan atas kegiatan/proyek.

- 3) Meningkatkan kualitas dari personil khususnya pada jabatan level menengah kebawah, guna meningkatkan akan profesionalisme dari para pelaksana-pelaksana tugas.
- 4) Serta menghimpun aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputro Gunawan, Drs. MBA. Anggaran Perusahaan. Yogyakarta. 1979.
- Himpunan Peraturan Keuangan DEPHANKAM. 1988. Jakarta : Ditjen Renungar DEPHANKAM.
- J. Ravianto. Produktivitas dan Manajemen. Cetakan Ketiga 1985.
- Metode Penilaian Pelaksanaan Pembinaan Keuangan di Tingkat Kaku dan Pekas di Lingkungan TNI AL. 1989. Jakarta : Petunjuk Teknik Kadiskual.
- Petunjuk Teknik Penyusunan Perhitungan Anggaran Departemen Pertahanan dan Keamanan. Jakarta. 1992.
- Petunjuk Pembinaan Keuangan HANKAM. Jakarta. 1986. Surat Keputusan Menhankam Nomor : Skep/786/V/1986.
- Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara dan Sistem Pengawasan. Edisi 1992. Jakarta : Mini Jaya Abadi. CV.
- Sejarah TNI Angkatan Laut. Edisi 1992. Jakarta : Direktorat Perawatan Personil TNI Angkatan Laut.
- Suparmoko. M, DR. MA. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta : BPFE, Anggota IKAPI.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Cima Kalingga Dewi Saragih
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 04 Pebruari 1968
Agama : Kristen Protestan
Nama Orang Tua : Bapak, A.M Saragih
Ibu, Triniarsih
Alamat : Jl. Dukuh Pinggir V No. 3
Tanah Abang
Jakarta Pusat (10230).
Pengalaman Kerja : Dinas Keuangan TNI Angkatan Laut
Bag. Garbia MABESAL
Tahun 1992 - Saat Ini.
Pendidikan :
1. SDN Kebon Kacang 01 Pagi Jakarta, Tahun 1974-1980.
2. SMPN 72 Jakarta, Tahun 1980-1983.
3. SMAN 25 Jakarta, Tahun 1983-1986.
4. STIE Perbanas Program D-III, Jakarta.
Tahun 1986-1990.
5. Universitas Darma Persada Fakultas Ekonomi Jurusan
Manajemen Keuangan Perbankan Jakarta.
Tahun 1993-1996.

Jakarta, 31 Agustus 1996

Cima Kalingga Dewi Saragih